



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021**



**Jl. JenderalJLNI Sudirman No. 182
Kuala Tungkal
Fax 322620**

**Jalan Jenderal Sudirman No 182
Kuala Tungkal
Fax 322620**

KATA PENGANTAR

ampiran
Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Nomor : /Renkeu/2022
Tentang : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2021 ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis yang dibebankan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2021.

LKjIP ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP sebagai salah satu alat penilai kinerja yang merupakan wujud transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, LKjIP juga bermanfaat bagi evaluasi internal sebagai umpan balik (*feedback*) dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi yang lebih komprehensif.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 serta perkembangan dalam upaya pencapaian atas sasaran strategi Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

Demikian LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kuala Tungkal, 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si

Rebina Utama Muda

Np.19680817 199203 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit tentang capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam rencana kerja Tahun 2021.

Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan berikut realisasinya.

Pada Tahun 2021, Dengan 3 Program, 19 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan, maka dicapai rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan untuk Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 100 % dengan kategori *Baik*.

Hasil capaian kinerja tersebut, menunjukkan bahwa secara umum seluruh unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya.

Namun demikian perbaikan dalam perumusan indikator kinerja masih perlu dilaksanakan lebih lanjut, untuk lebih mengarah pada optimalisasi perwujudan peran dan fungsi Sekretariat Daerah dalam perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kebijakan daerah. Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan *selfassessment* atas hasil kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi rujukan yang efektif menuju upaya perbaikan berkelanjutan oleh seluruh aparatur pelaksana untuk mewujudkan optimalisasi kinerja Sekretariat Daerah yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I.	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	2
	1.3. Gambaran Umum Sekretariat Daerah	2
	1.4. Struktur Organisasi	9
	1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II.	PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
	2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	13
	2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
	2.1.2. Formula Indikator	18
	2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan	18
	2.1.4. Program, Kegiatan dan Pendanaan	21
	2.2. Rencana Kerja	31
	2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	32
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	
	3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021	34
	3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	34
	3.1.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020	48
	3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	49
	3.1.4. Perbandingan Realisasi s.d. Tahun 2021 dengan Target Renstra ..	50
	3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2021	62
BAB IV.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	67
	B. Langkah Kedepan	68

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

Cascading Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Tujuan Sekretariat Daerah	14
Tabel 2.2 : Sasaran/Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026	15
Tabel 2.3 : Strategi dan arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah	20
Tabel 2.4 : Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021	21
Tabel 2.5 : Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan	27
Tabel 2.6 : Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2021	32
Tabel 3.1 : Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Sekretariat Daerah	32
Tabel 3.2 : Realisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2021	36
Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi Tahun 2021 Dengan Tahun 2020	48
Tabel 3.4 : Realisasi Anggaran Per-program Setda Tanjab Barat Tahun 2021.	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Dalam birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang menyelenggarakan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku unsur pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan Sekretariat Daerah tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai pada lingkup Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan bagi semua pihak. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 yang dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang ditetapkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, adalah :

1. Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah selama Tahun 2021, dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang, maju, aman, adil dan merata berlandaskan iman dan taqwa.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah ini adalah untuk :

1. Dapat digunakan sebagai media akuntabilitas Sekretariat Daerah yang menjadi acuan baku dan analisis lanjutan, mengarah pada sinergitas, sinkronisasi, dan integritas pelaksanaan program-kegiatan Sekretariat Daerah sesuai dengan acuan Renstra Sekretariat Daerah dengan arah kebijakan mewujudkan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. LKIP Sekretariat Daerah ini juga berorientasi sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga Sekretariat Daerah dapat berperan dan berfungsi maksimal memfasilitasi, merumuskan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1.3. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Sekretariat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.



1. Sekretaris Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama serta mengkoordinasikan Sekretariat DPRD dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan serta urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, serta keagamaan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan keagamaan, hukum, dan kerjasama.
2. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
4. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan keagamaan, hukum, serta Kerjasama.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya lingkup pemerintahan dan otonomi daerah meliputi: bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sekretariat DPRD, pemilihan umum, forkopimda, tugas pembantuan, pemberdayaan masyarakat desa, kecamatan, administrasi kewilayahan, pertanahan dan kerjasama.



Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian.
2. perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan aparatur pemerintahan, serta administrasi kewilayahan dan Kerjasama.
3. pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan aparatur pemerintahan, serta administrasi kewilayahan dan Kerjasama.
4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan aparatur pemerintahan, serta administrasi kewilayahan.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di kesejahteraan rakyat dan keagamaan meliputi: bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan keagamaan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian.
2. perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, sosial, dan keagamaan.
3. pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat, sosial, dan keagamaan.
4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat, sosial, dan keagamaan.
5. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian.
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Bagian Hukum

Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan produk hukum daerah, dokumentasi dan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah.

Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian.
2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perumusan produk hukum daerah, dokumentasi dan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah.
3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. pengumpulan bahan perumusan penyusunan produk hukum daerah.
5. fasilitasi penetapan produk hukum daerah.



6. penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Daerah.
7. pengharmonisasian produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. pelaksanaan pendokumentasian dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah secara konvensional dan/atau elektronik
9. pelaksanaan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
10. pengkajian dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah.
11. penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah (PROPEMPERDA).
12. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perumusan kebijakan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan sosialisasi produk hukum serta pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah.
13. pelaksanaan pelayanan administratif dan teknis pembinaan hak asasi manusia.
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4. Kerjasama

Bagian Kerjasama dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian.
2. Menyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama.
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama.
4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama.
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama.
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerjasama.
7. dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi pada bagian sumber daya alam, perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa serta mengkoordinasikan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, kehutanan, pangan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, menengah, tenaga kerja, transmigrasi, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, perhubungan, perencanaan, penelitian dan pengembangan.



Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam, perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa.
2. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang sumber daya alam, perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa.
3. pelayanan administrasi di bidang sumber daya alam, perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa.
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program di bidang sumber daya alam, perekonomian, dan administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Bagian Sumber Daya Alam

Bagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya lingkup sumber daya alam meliputi: bidang pertanian, kehutanan, pangan, lingkungan hidup, sumber daya air, serta energi dan sumber daya mineral.

Bagian Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian.
2. perumusan kebijakan di bidang pertanian dan kehutanan, ketahanan pangan, perikanan dan sumber daya air, serta lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral.
3. pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang pertanian dan kehutanan, ketahanan pangan, perikanan dan sumber daya air, serta lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral.
4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan kehutanan, ketahanan pangan, perikanan dan sumber daya air, serta lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya lingkup perekonomian meliputi: bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, menengah, penanaman modal, perindustrian, dan perdagangan.

Bagian Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian.
2. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan BUMD, perindustrian dan perdagangan, serta koperasi, dan ekonomi mikro kecil.
3. pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang penanaman modal dan BUMD, perindustrian dan perdagangan, serta koperasi dan Ukm.
4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan BUMD, perindustrian dan perdagangan, serta koperasi dan Ukm.



5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi di bidang administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian.
2. perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
3. pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4. Bagian Pengadaan Barang/jasa

Bagian Pengadaan Barang/Jasa oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintahan Daerah.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian.
2. pengelolaan pengadaan barang/jasa.
3. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
4. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah terkait serta mengkoordinasikan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan penunjang bidang keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
2. perumusan kebijakan di bidang organisasi dan tatalaksana, umum, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.
3. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang organisasi dan tatalaksana, umum, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.



4. pelayanan administrasi di bidang organisasi dan tatalaksana, umum, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program di bidang organisasi dan tatalaksana, umum, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi serta penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang penataan kelembagaan dan kepegawaian, tata laksana dan pelayanan publik, serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian.
2. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian, tata laksana dan pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.
3. pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang kelembagaan dan kepegawaian, tata laksana dan pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.
4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan kepegawaian, tata laksana dan pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian.
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan serta rumah tangga.
3. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan serta rumah tangga.
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.3. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan lingkup sekretariat daerah.



Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan; dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
4. penyusunan laporan aset sekretariat daerah.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian.
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.
3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.
4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

4. STAF AHLI

Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati, Staf Ahli mempunyai tugas :

1. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati terkait bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati terkait bidang hukum dan politik.
3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati terkait bidang pemerintahan.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjab Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Susunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dari sisi sumber daya aparatur di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada bulan Desember 2021 jumlah PNS tercatat sebanyak 136 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 99 orang dan perempuan 37 orang.



Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Berdasarkan Golongan

Golongan IV					Golongan III				Golongan II				Golongan I				Total
A	B	C	D	E	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
9	6	3			28	15	24	17	1	1	6	22				2	136

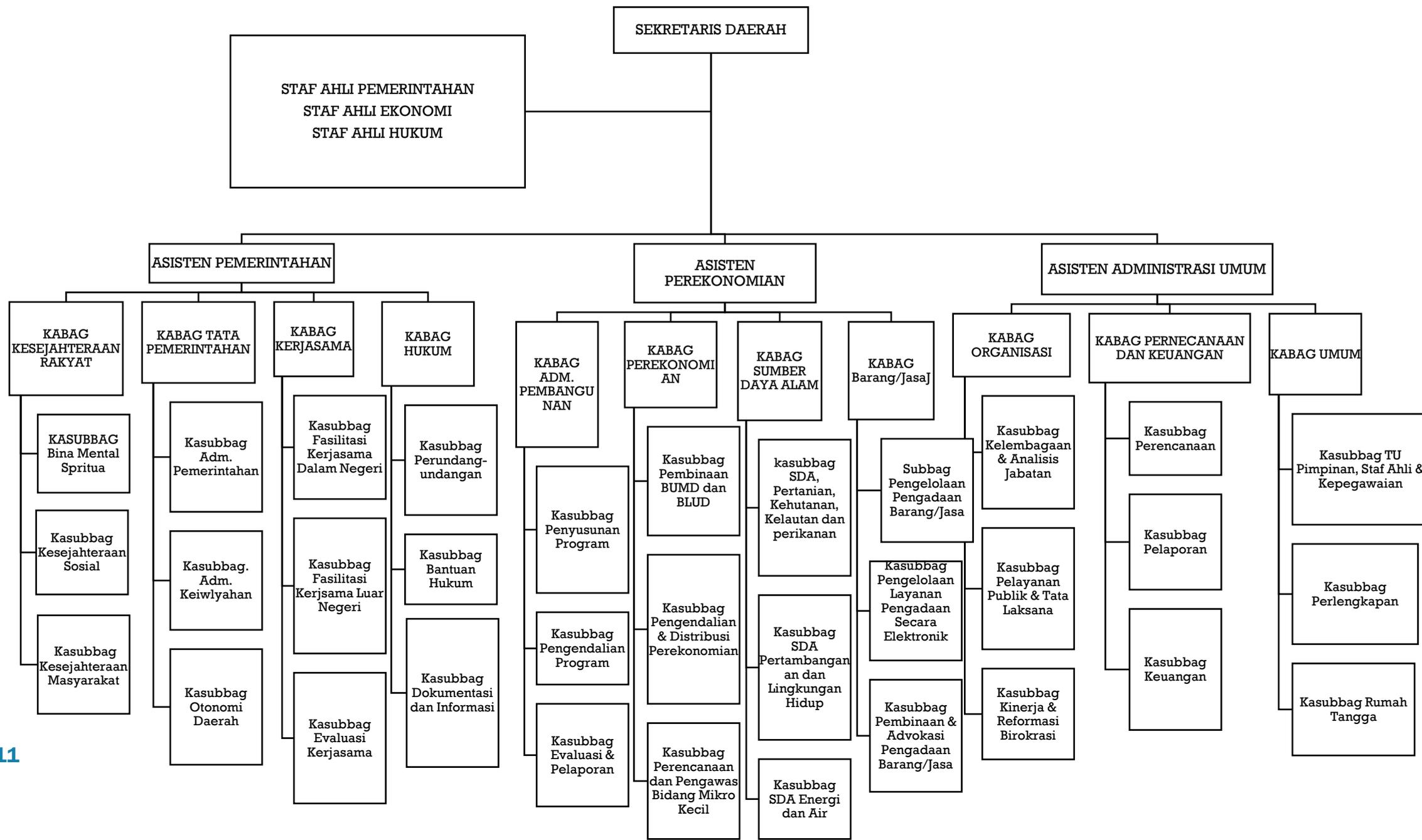
Sumber : Bagian Umum 2021

Tabel 1.2
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S3	S2	S1	D1-D3	SLTA	SLTP	SD	TOTAL
	12	63	12	48			136

Sumber : Bagian Umum 2021

Adanya hubungan komunikatif dan kekeluargaan yang erat antar pegawai di Sekretariat Daerah semakin memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini keterbatasan yang dimiliki oleh Pegawai yang satu dapat ditutupi dengan kelebihan (kemampuan) pegawai yang lain tanpa harus terikat secara struktural. Selanjutnya apabila ada kesulitan yang dihadapi oleh beberapa orang pegawai dalam pelaksanaan tugas, maka dilakukan kerjasama dengan yang lain untuk mengatasi kesulitan tersebut.





1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LAKjIP Tahun 2021 berupa Pengantar; Maksud dan Tujuan; Data Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Tanjab Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Susunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah; Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2021, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan pertujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja tahun 2020. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2021 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (Lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretaris Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretaris Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretaris Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Tanjung Jabung Barat.

2.1.1. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahunan, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis, Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve (SMART-C).

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah tahun 2021 berdasarkan pada dokumen Renstra Setda yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2 sebagai berikut :



Tabel 2.1.
Tujuan Sekretaris Daerah

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kualitas perencanaan, Keuangan dan pelaporan dilingkup Sekretariat Daerah Kab. Tanjab Barat.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Kelembagaan yang Efektif.3. Meningkatkan Pelayanan kehumasan dan Keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah.
2.	Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah.2. Meningkatnya Pengamalan nilai-nilai Agama dan Nilai kesejahteraan rakyat3. Meningkatnya penataan produk hukum daerah.4. Meningkatnya Kerjasama antar daerah, Lembaga/perorangan Dalam Negeri dan Luar Negeri5. Meningkatnya Administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah6. Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah7. Meningkatnya koordinasi dan pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif

Sumber : Dok. Resntra 2021-2026 perubahan



Tabel 2.2.

Sasaran/Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Target
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan dilingkup Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan pelayanan administrasi surat menyurat OPD dan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana kantor setda, KDH dan WKDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Meningkatnya Kualitas pelayanan public akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	Nilai Kematangan perangkat daerah	29	32	35	40	43	43	
		Nilai AKIP Kabupaten	60,01	62,01	64,01	66,01	70,00	72,00	72,00
		Indeks Kepuasan	80,66	80,68	80,70	80,72	80,74	80,76	80,76
3.	Meningkatnya pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan KDH, WKDH, dan Sekretaris Daerah	Persentase kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam	Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Skor LPPD	3<STSAST						



	menyelenggarakan otonomi daerah								
5.	Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Meningkatnya penataan produk hukum daerah	Persentase produk hokum daerah yang diundangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Meningkatnya kerja sama antar daerah/Lembaga/perseorangan dalam negeri & luar negeri	Persentase kerjasama antar daerah, Lembaga/perorangan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	Persentase kebijakan bidang ekonomi yang dilaksanakan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	Meningkatnya akses informasi pembangunan daerah	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



10.	Meningkatnya koordinasi dan pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
-----	---	--	------	------	------	------	------	------	--

Sumber : Renstra 2021



2.1.2. Formula Indikator

- Jumlah dokumen perencanaan pelaporan keuangan yang telah diverifikasi dibagi jumlah dokumen perencanaan pelaporan yang disampaikan dikali seratus persen
- Total nilai perangkat daerah dibagi jumlah perangkat daerah
- Total dari nilai persepsi perunsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai perimbang
- Hasil evaluasi kementerian PAN & RB
- Jumlah Hukum Daerah yang diundangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dibagi jumlah Produk hukum yang ada dikali seratus persen
- Jumlah IKK LPPD yang harus diisi oleh OPD dibagi jumlah OPD yang mengisi IKK LPPD dikali seratus persen
- Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri
- Jumlah kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dibagi jumlah kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang ada dikali seratus persen
- Jumlah Hukum Daerah yang diundangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dibagi jumlah produk hukum yang ada dikali seratus persen.
- Jumlah kerjasama antar daerah yang terfasilitasi dibagi jumlah kerjasama daerah Lembaga yang diterbitkan dikali seratus persen.
- Jumlah kebijakan bidang ekonomi yang dilaksanakan dibagi jumlah kebijakan ekonomi yang ada dikali seratus persen.
- Jumlah evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah dibagi dengan pengendalian program pembangunan daerah yang dilaksanakan dibagi seratus persen.
- Jumlah paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan dibagi jumlah pengadaan barang & jasa ditanyakan dan dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu dikali seratus persen.
- Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif dibagi jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang ada dikali seratus persen.

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah Langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/prangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau Langkah-



langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip : menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat interent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah



Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah.

Visi RPJMD : Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah			
Misi 3 RPJMD yang terkait : Peningkatan Tata Kelola Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	<ul style="list-style-type: none">• Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Setiap Perangkat Daerah• Menggunakan Teknologi Informasi Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja• Penguatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	✓ Efektivitas dan Efisiensi dalam pencapaian target-target Kinerja
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none">• Menyederhanakan Proses dalam Pelayanan Publik• Menerapkan teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik• Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana serta	✓ Pelayanan Publik yang Tepat, Efektif dan Efisien



		Aparatur Pelayanan Publik	
--	--	------------------------------	--

2.1.4. Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Adapun Kegiatan adalah mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah. Sedangkan Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk tahun 2021 ada 3 Program 19 kegiatan dan 55 sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021

No.	Program dan Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			
1	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Persentase Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%



		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian. Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keuangan Tersusun Berkualitas dan tepat waktu	
		Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tingkat Kehadiran pegawai ASN	100%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Administrasi Umum	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		Penyediaan peralatan rumah Tangga		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD		



5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan OPD	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya		
8	Adminitrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	Persentase gaji dan operasional KDH dan WKDH yang dibayarkan	100%
10	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analiss Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,66
		Fasilitasi pelayanan Publik dan Tata laksana	Nilai AKIP Kabupaten	60,01



		Peningkatan kinerja reformasi birokrasi	Persentase OPD Kab. Tepat fungsi	100%
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi keprotokolan	Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	100%
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
		Pendokumentasian tugas pimpinan		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
12	Administrasi Tata Pemerintah	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase keterisian data IKK LPPD dan Skor LPPD	100% dan 3<ST<4 Skor LPPD
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait		
		Kesejahteraan Masyarakat		
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase produk hukum daerah yang diundangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%
		Fasilitasi Bantuan Hukum		
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		



15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Persentase kerjasama antar daerah, Lembaga/perorangan yang terfasilitasi	100%
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		
		Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama		
Program Perekonomian dan Pembangunan				
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase kebijakan bidang ekonomi yang dilaksanakan	100%
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Cakupan Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah	100%
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu	100%
		Pengelolaan Layanan Pengadaaan secara Elektronik		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		



19	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	80%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, Kebijakan Energi dan Air		

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat, maka diperlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Anggaran untuk Tahun 2021 sebesar Rp 71.341.003.774,00 (Tujuh puluh satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah). Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi Anggaran dalam Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai besaran anggaran Rp 21.410.704.661,00 (Dua puluh satu miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), Belanja Barang dan Jasa besaran anggaran Rp. 36.268.403.932,00 (Tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), Belanja Subsidi besaran Anggaran Rp. 7.043.441.650,00 (Tujuh miliar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan Belanja Hibah besaran Anggaran Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
2. Belanja Modal Anggaran Belanja Modal terdiri dari belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan besar anggaran sebesar Rp 6.268.453.531,00 (Enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).



No.	Program dan Kegiatan	Anggaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 51.865.290.673,00
1.	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 88,795,000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 88,795,000,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 20.665.096.761,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 19.573.191.761,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 976.905.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian.Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 63.325.000,00
	Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 51.675.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 655.918.800,00
	Pengadaan Pakaian Dinas BEserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 353.518.800,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 252.400.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 50.000.000,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 12.161.391.944,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 259.856.864,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 438.890.338,00
	Penyediaan peralatan rumah Tanga	Rp. 1.714.127.267,00



	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 2.792.240.220,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 66.009.255,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 6.890.268.000,00
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.666.978.594,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 4.666.978.594,00
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.596.005.523,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 463.425.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.840.500.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.654.615.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 637.465.523,00
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 5.304.950.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp. 2.682.669.000,00
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 747.511.800,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	Rp. 1.874.769.200,00



	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 87.425.000,00
8.	Adminitrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.062.207.900,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	Rp. 1.062.207.900,00
10.	Penataan Organisasi	Rp. 403.997.473,00
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analiss Jabatan	Rp. 112.871.156,00
	Fasilitasi pelayanan Publik dan Tata laksana	Rp. 124.995.606,00
	Peningkatan kinerja reformasi birokrasi	Rp. 166.130.711,00
11.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 2.259.948.678,00
	Fasilitasi keprotokolan	Rp. 188.519.800,00
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 465.923.000,00
	Pendokumentasian tugas pimpinan	Rp. 1.605.505.878,00
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 10.579.238.415,00
12.	Administrasi Tata Pemerintah	Rp. 662.687.795,00
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 369.479.680,00
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 126.711.400,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 163.496.715,00
13.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 8.339.359.383,00
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Rp. 7.590.003.635,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 718.213.300,00



	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 31.142.448,00
14.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 1.006.597.269,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 488.814.271,00
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 242.638.000,00
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 275.144.998,00
15.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp. 570.593.968,00
	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Rp. 317.892.065,00
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Rp. 146.232.203,00
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Rp. 106.469.700,00
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 8.809.049.686,00
16.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 7.277.477.298,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 7.138.436.500,00
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 67.357.848,00
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp. 71.682.950,00
17.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 305.663.400,00
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp. 124.350.00,00
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp. 36.313.400,00



	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 145.000.000,00
18.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 587.150.288,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 191.450.000,00
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 325.700.000,00
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan BArang dan Jasa	Rp. 70.000.288,00
19.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya ALam	Rp. 638.758.700,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp. 85.739.600,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp. 485.416.600,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, Kebijakan Energi dan Air	Rp. 67.602.500,00

2.2. Rencana Kerja

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan



strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada lampiran LKIP Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel. 2.6.
Perjanjian Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah.	Persentase Produk hukum daerah yang diundangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%
2.	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat.	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%
3.	Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.	Skor nilai LPPD Kab. Tanjab Barat	3<STSAST
		Persentase keterisian data IKK LPPD	100%
4.	Meningkatnya Kerjasama antar daerah/Lembaga/ perseorangan dalam negeri & luar negeri	Persentase Kerjasama antar daerah, Lembaga/perorangan yang terfasilitasi	100%
5.		Persentase evaluasi dan pengenalan program pembangunan daerah	100%



	Meningkatnya akses informasi pembangunan daerah	Persentase paket pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu	100%
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan public akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,66
		Nilai AKIP KAbupaten Tanjung Jabung Barat	60,01
		Persentase OPD Kab. Tepat fungsi	100%
7.	Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	Persentase kebijakan bidang ekonomi yang dilaksanakan	100%
8.	Meningkatnya koordinasi dan pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	100%
9.	Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan dilingkup Sekretaris Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.	100%
		Cakupan pelayanan administrasi surat menyurat OPD dan Masyarakat	100%
		Cakupan pelayanan saran dan prasarana kantor setda, KDH dan WKDH	12 bulan
10.	Meningkatnya Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan KDH, WKDH, dan Skeretaris Daerah.	Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas-tugas pokok. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terlebih dahulu dilakukan pengukuran atas capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah dialokasikan.

3.1. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja indikator sasaran pada masing-masing tujuan, secara umum diuraikan dalam tabel-tabel berikut :

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1
Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya penataan produk hukum daerah	Persentase Produk hukum daerah yang diundangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%	146,93%
2.	Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	86,44%
3.	Meningkatnya kemampuasan dan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah	Skor nilai LPPD Kab. Tanjab Barat	3<STSAST	-
		Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	100%
4.	Meningkatnya Kerjasama antar daerah/Lembaga/vperseorangan dalam negeri & luar negeri	Persentase Kerjasama antar daerah, Lembaga/perorangan yang terfasilitasi	100%	100%
5.	Meningkatnya akses informasi pembangunan daerah	Persentase evaluasi dan pengenalan program pembangunan daerah	100%	91,83%
		Persentase paket pengadaan Barang & Jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu	100%	62,12%



6.	Meningkatnya Kualitas pelayanan public akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,66	81,45
		Nilai AKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat	60,01	-
		Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran tepat fungsi	100%	96,73%
7.	Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	Persentase kebijakan bidang ekonomi yang dilaksanakan	100%	94,44%
8.	Meningkatnya koordinasi dan pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	100%	100%
9.	Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan dilingkup Skeretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	100%
		Cakupan pelayanan administrasi surat menyurat OPD dan Masyarakat	100%	100%
		Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana kantor setda, KDH dan WKDH	100%	100%
10.	Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH, dan Sekretaris Daerah	Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	100%	100%



Tabel 3.2
Realisasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
1	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Bagian Setda diselenggarakan - Jumlah Dokumen Setda yang disusun sesuai dengan aturan dan tepat waktu	10 Dok	10 Dok	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan tersusun berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu ASN yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Pembayaran Honorarium ASN Tepat Waktu	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengujian/Verifikasi OPD	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai / ASN	100%	100%	100%



	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang tersedia	462 Stel	462 Stel	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang di Jalankan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan/Pelatihan yang difasilitasi	2 Orang	-	0%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan jada Instansi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan (ATK) yang Tersedia	11 Item/Jenis	11 Item/Jenis	100,00%
	Penyediaan peralatan rumah Tangga	- Jumlah Peralatan Rumah tangga yang Tersedia. - Jumlah Bahan Logistik (Alat Listrik, Alat dan Bahan Pembersih/Kebersihan) Rumah Dinas/Jabatan yang Tersedia	60 Item/Jenis 55 Jenis/Item	59 Item/Jenis 55 Jenis/Item	98,33% 100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Waktu Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor. - Jumlah waktu Ketersediaan Makanan dan Minuman Rumah Dinas Jabatan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	100% 100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan (Blagko atau Formulir, Buku, Map) dan Pengadaan yang Tersedia	6 Jenis/Item	6 Item/Jenis	100%



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD penunjang Urusan OPD	30 Jenis/Item	30 Jenis/Item	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang tersedia	30 Jenis/Item	30 Jenis/Item	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Pendistribusian dan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Setda	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Waktu Penyediaan Beban Pemakaian Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet/TV Berlangganan.	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Jumlah Waktu Penyediaan Beban Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		- Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	45 Jenis/Item	45 Jenis/Item	100%
		- Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Pelayanan Umum (Tenaga Kebersihan) Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%



7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara - Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan (Tenaga Supir) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	88 Unit 12 Bulan	88 Unit 12 Bulan	100% 12 Bulan
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	- Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi - Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara/Rehabilitasi	1 Gedung 3 Rumah Dinas	1 Gedung 3 Rumah Dinas	100% 100%
8	Adminitrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase gaji dan operasional KDH dan WKDH yang dibayarkan	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	Jumlah waktu KDH/WKDH yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	100%
10	Penataan organisasi	Persentase OPD Kabupaten Tepat Fungsi Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP Kabupaten	100% 80,66 60,01	96,73% 89,45	96,73% 100%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analiss Jabatan	- Jumlah OPD yang Right Sizing - Jumlah Peraturan Bupati terkait kelembagaan	3 OPD 3 Perbup	3 OPD 3 Perbup	100% 100%



		- Jumlah Tersusunnya Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		- Jumlah Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Fasilitasi pelayanan Publik dan Tata laksana	- Persentase Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%
		- Jumlah Tersusunnya Laporan SOP.	25 SOP	44 SOP	
		- Jumlah regulasi kebijakan ketatalaksanaan	2 regulasi	2 regulasi	100%
		- Data Pengaduan Pelayanan Publik Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		- Data Inovasi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Peningkatan kinerja reformasi birokrasi	- Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)	1 Laporan	1 Laporan	100%
		- Jumlah Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten	1 Laporan	1 Laporan	100%
11.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasian	100%	100%	
	Fasilitasi keprotokolan	- Frekuensi kegiatan pimpinan daerah yang dilakukan secara keprotokolan.	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
		- Jumlah dokumen kegiatan keprotokolan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan daerah - Jumlah media jurnal/surat kabar yang dilakukan kerjasama peliputan kegiatan pimpinan daerah 	12 Bulan 90 Media	12 Bulan 90 Media	100% 100%
	Pendokumentasian tugas pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi jasa penayangan dokumentasi cetak dan digital kegiatan pimpinan - Frekuensi sewa billboard area bandara - Jumlah dokumen kegiatan pendokumentasian 	12 Bulan 16 Kali	12 Bulan 16 Kali	100% 100%
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
12.	Administrasi Tata Pemerintah	Skor LPPD	3<ST≤4 Sangat Tinggi	-	-
	Penataan Administrasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Permerintahan Daerah - Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal. - Jumlah Pelaksanaan Event dalam rangka peningkatan nilai kebangsaan. 	1 Laporan 1 Laporan 2 Event (Hari jadi Kabupaten & HUT RI)	1 Laporan 1 Laporan 2 Event (Hari jadi Kabupaten & HUT RI)	100% 100% 100%



	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Pembukuan nama Rupabumi. - Jumlah Tanda Batas Kabupaten & Jumlah tanda batas Kecamatan. 	13 Kecamatan	0 Kecamatan	0,00%
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kecamatan yang dilakukan penilaian camat teladan. - Jumlah Rapat Koordinasi camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. - Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan PATEN. - Jumlah monitoring pelaksanaan perencanaan, penganggaran, Perbendaharaan 	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100%
			1 Dok	1 Dok	100%
			1 Laporan	1 Laporan	100%
			2 Laporan	2 Laporan	100%
13.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	86,44%	86,44%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah cabang lomba musyabaqah tilawatil qur'an (MTQ) tingkat provinsi yang diikuti. - Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan. - Jumlah pembinaan pengembangan tilawatil Qur'an yang dilaksanakan. 	26 Cabang Lomba	26 Cabang Lomba	100%
			9 kali perigatan hari besar	5 kali perigatan hari besar	55,56%
			3 Kali	3 Kali	100%
			5 Kali	5 Kali	100%



	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre (TC) MTQ. - Jumlah Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Safari Jum'at. 	57 Kali	57 Kali	100%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga yang difasilitasi, diverifikasi, dan dimonitoring, dievaluasi serta diberi rekomendasi terkait permohonan hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat social. - Jumlah pembinaan Da'i Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. - Jumlah guru minggu yang diberikan intensif pembinaan. - Jumlah guru agama, imam, mudim dan guru ngaji, khatib dan bilal yang diberi pembinaan. - Jumlah pelaksanaan festival anak sholeh tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. - Jumlah fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dan pengiriman TKHD. 	45 Masjid, 7 Ponpes, 3 Madrasah, dan 2 Organisasi/Kelompok pengajian 134 Orang 200 Orang 3.545 Orang 2 Kali	45 Masjid, 7 Ponpes, 3 Madrasah, dan 2 Organisasi/Kelompok pengajian 134 Orang 100 Orang 5.349 Orang 2 Kali	100% 100% 50% 150,89% 100%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi serta pertemuan forum tim pembina UKS tingkat kabupaten. 	2 kali	2 kali	100%



		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyelesaian proses pencatatan pernikahan bagi masyarakat. - Jumlah pelaksanaan kegiatan amaliya ramadhan dua hari raya di 13 kecamatan. 	653 Pasang	556 Pasang	85,15%
			5 kali	5 kali	100%
14.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.	Persentase produk hukum daerah yang diundangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.			
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perda yang diundangkan - Jumlah Perbup yang diundangkan. - Jumlah SK yang diterbitkan. 	12 Perda	15 Perda	125,00%
			50 Perbup	34 Perbup	68,00%
			100 Sk	846 SK	84,00%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang ditangani. - Jumlah laporan hasil HAM. - Jumlah laporan Kadarkum. 	3 Kasus	3 Kasus	100%
			4 Kali Lap. Aksi HAM	8 kali Lap. Aksi HAM	100%
			1 Lap Kadarkum	1 Lap Kadarkum	100%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Koordinasi dan konsultasi penetapan raperda (Harmonisasi). - Jumlah Laporan SJDIIH. - Jumlah perda dan himpunan perda Desa/Kel. Yang mendapatkan penyuluhan hukum. - Jumlah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan 	4 Kali Jumlah koorinasi	15 Kali Jumlah koordinasi	375,00%
			1 Lap. SJDIIH	2 Lap. SJDIIH	200,00%
			12 Desa/Kel	12 Desa/Kel	100,00%
			600 Buku Raperda dan Himpunan Perda	700 Buku Raperda dan Himpunan Perda	116,67%
15.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerja sama antar daerah,			



		Lembaga/perorangan yang terfasilitasi			
	Fasilitasi Kerjasama Dalam Daerah.	Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan dalam negeri yang difasilitasi.	67 Dokumen	67 Dokumen	100%
	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan luar negeri yang difasilitasi.	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi kerjasama yang difasilitasi.	70 Dokumen	70 Dokumen	100%
	Program Perekonomian dan Pembangunan				
16.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.	Persentase kebijakan bidang ekonomi yang dilaksanakan.	100%	94,44%	94,44%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah BUMD yang diberikan penyertaan modal - Jumlah BUMD yang diberi Subsidi (PDAM Tirta Pengabuan). - Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD). - Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD. 	<ul style="list-style-type: none"> 3 BUMD 1 BUMD 1 Laporan 4 kali 	<ul style="list-style-type: none"> 1 BUMD 1 BUMD 1 Laporan 4 Kali 	<ul style="list-style-type: none"> 33,33% 100% 100% 100%
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah monitoring dan evaluasi Pengendalian dan distribusi perekonomian daerah. - Jumlah laporan sembako. - Jumlah laporan TPID. 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Kali 12 Laporan 5 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Kali 12 Laporan 5 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100%



	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan KUPEM. - Jumlah laporan Pupuk. - Jumlah monitoring dan pembinaan KUPEM. - Jumlah monitoring penyaluran pupuk dan pestisida tepat sasaran. 	<p>12 Laporan</p> <p>4 Laporan</p> <p>4 Kali</p> <p>4 Kali</p>	<p>12 Laporan</p> <p>4 Laporan</p> <p>4 Kali</p> <p>4 Kali</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
17.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase evaluasi dan penganadalian program pembangunan daerah			
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen data pembangunan Kab. Tanjab Barat. - Frekuensi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kab. Tanjab Barat. 	<p>1 Dokumen</p> <p>12 Bulan</p>	<p>1 Dokumen</p> <p>12 Bulan</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring.	4 Kali	4 Kali	100%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah LPPK dan Rekap Program OPD. - Jumlah pelaporan laporan tepra sismonteptra. 	<p>12 Laporan</p> <p>12 Laporan</p>	<p>12 Laporan</p> <p>12 Laporan</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
18.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas			
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang ditender.	255 Kegiatan Tender	248 Kegiatan Tender	97,25%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	- Jumlah pemeliharaan Co. Location.	1 Paket Co Location	1 Paket Co Location	100%
					100%



		- Jumlah server yang dilakukan Pengecekan dan servis berkala.	1 Server Produksi, 1 Server Backup	1 Server Produksi, 1 Server Backup	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah peserta sosialisasi. - Jumlah peserta ujian sertifikasi PPBJ tingkat dasar.	-	-	-
19.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya ALam	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	80%	80%	100,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan monitoring bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, Kehutanan, dan Kelautan dan Perikanan. - Jumlah Dokumen Laporan evaluasi.	13 kali 1 Laporan	13 kali 1 Laporan	100,00% 100,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Pertambangan dan lingkungan hidup. - Jumlah Laporan evaluasi.	5 Kali 1 Laporan	5 kali 1 Laporan	100,00% 100,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, Kebijakan Energi dan Air	- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Energi dan Air. - Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi.	5 Kali 1 Laporan	5 kali 1 Laporan	100,00% 100%



3.1.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun 2021 Dengan Tahun 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
			2020	2021
1.	Meningkatnya penataan produk hukum daerah	Persentase Produk hukum daerah yang diundangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	52,38%	146,93%
2.	Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	54,11%	86,44%
3.	Meningkatnya kemampuasan dan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah	Skor nilai LPPD Kab. Tanjab Barat	2,7847(T)	-
		Persentase keterisian data IKK LPPD	-	100%
4.	Meningkatnya Kerjasama antar daerah/Lembaga/vperseorangan dalam negeri & luar negeri	Persentase Kerjasama antar daerah, Lembaga/perorangan yang terfasilitasi	100%	100%
5.	Meningkatnya akses informasi pembangunan daerah	Persentase evaluasi dan pengenalan program pembangunan daerah	-	91,83%
		Persentase paket pengadaan Barang & Jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu	66,67%	62,12%
6.	Meningkatnya Kualitas pelayanan public akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,66	81,45
		Nilai AKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat	56,57	-
		Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran tepat fungsi	95,26%	97,73%
7.	Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	Persentase kebijakan bidang ekonomi yang dilaksanakan	-	94,44%



8.	Meningkatnya koordinasi dan pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	100%	100%
9.	Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan dilingkup Skeretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	98,96%	100%
		Cakupan pelayanan administrasi surat menyurat OPD dan Masyarakat	100%	100%
		Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana kantor dan Rumah Tangga Pimpinan yang Baik dan Terpelihara Serta Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	85%	100%
10.	Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH, dan Sekretaris Daerah	Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	100%	100%

3.1.3. Analisis Penyebab keberhasilan /kegagalan kinerja

Capaian Indikator Kinerja Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Pada Tahun 2020 yaitu sebesar 54,11% sedangkan Capaian Indikator Pada Tahun 2021 Sebesar 86,44% atau meningkat jika dibandingkan capaian pada tahun 2020, Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 yang lalu merupakan tahun awal Pandemi COVID 19 Sehingga Kegiatan-kegiatan tidak dilaksanakan karena terkendala masalah prokes dimasa pandemic dan hal lain menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan pada tahun 2020 karena adanya Refokusing anggaran untuk menangani dampak Pandemi COVID 19.

Capaian Indikator Kinerja Persentase paket pengadaan Barang & Jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu mengalami penurunan capaian yaitu tahun 2020 sebesar 66,67% sedangkan 2021 sebesar 62,12%, Hal ini karena pada sub kegiatan pembinaan dan Avokasi Pengadaaan BARang dan Jasa di Tahun Anggaran 2021 terjadi Pengurangan Anggaran dikarenakan kegiatan pada Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh BKPSDM KAB. Tanjung Jabung Barat, Pengambilan Alih kegiatan mengakibatkan 1 Kegiatan Sosialisasi dan 2 Kegiatan Sertifikasi tidak dapat dilaksanakan.



Capaian Indikator Persentase Produk hukum daerah yang diundangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, terdapat peningkatan yang signifikan yaitu tahun 2020 hanya sebesar 52,38% sedangkan 2021 sebesar 146,93% hal ini karena pada tahun 2020 adanya jumlah perkara, Jumlah laporan Inventarisasi Data Kegiatan Ranham dengan target 1 Kali Lomba Kadarkum dan Jumlah Masyarakat yang mendapat Penyuluhan Hukum dengan target 6 Desa / Kelurahan dan 450 orang yang mendapatkan penyuluh, tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan karena adanya Covid-19 dan Refocusing Anggaran.

3.1.4. Perbandingan Realisasi s.d. tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Setda

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi	Target Kinerja Sasaran					
			2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, keuangan dan pelaporan dilingkup Sekretaris Daerah	Persentase Penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Cakupan Pelayanan Administrasi surat menyurat OPD dan Masyarakat		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik akuntabilitas Kinerja dan	Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran tepat fungsi		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Nilai AKIP Kabupaten		60,01	62,01	64,-1	66,01	70,00	72,00



	Kelembagaan yang efektif	Indeks Kepuasan		80,66	80,68	80,70	80,72	80,74	80,76
3	Meningkatnya Pelayanan kehumasan dan keprotokolan KD, WKDH, dan Sekretaris Daerah	Persentase kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah	Persentase keterisian data IKK LPPD		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Skor LPPD							
5.	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Meningkatnya penataan produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang diundangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Meningkatnya Kerjasama antar daerah/Lembaga/Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	Persentase Kerjasama antar Daerah/Lembaga/Perorangan yang terfasilitasi		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Meningkatnya administrasi dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	Persentase kebijakan bidang ekonomi yang dilaksanakan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



9.	Meningkatnya akses informasi pembangunan daerah	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10.	Meningkatnya koordinasi dan pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	Persentase Koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dilingkup Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	2021	2021	2021
Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	100%

Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%. Realisasi sebesar 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan terdiri dari :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator Kinerja adalah Jumlah dokumen Perencanaan Bagian Setda yang diselaraskan yaitu 10 Dokumen. Hasil sub kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yaitu sebanyak 10 Dokumen atau



terserap 100%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan beberapa Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN indicator Jumlah Waktu ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan yaitu 12 Bulan terlaksana 12 Bulan, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD/Bagian sebanyak 12 Bulan, terlaksana sebanyak 12 Bulan, dan Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi anggaran dengan indicator Jumlah Dokumen Laporan realisasi Anggaran sebanyak 1 Dokumen dan Jumlah Dokumen Pelaporan sebanyak 4 Dokumen tercapai 4 Dokumen. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja yaitu waktu rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 12 Bulan terealisasi. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah, sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD indicator jumlah BMD OPD yang terkelola yaitu sebanyak 1.137 jenis teralisasi sebanyak 6.407 BMD yang terkelola atau tercatat.

Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	2021	2021	2021
Cakupan Pelayanan Administrasi Surat Menyurat OPD Masyarakat	100%	100%	100%

Cakupan Indikator Kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%. Realisasi sebesar 100% didapat dari akumulasi sub kegiatan yang terdiri dari :

Penyediaan Jasa Surat menyurat dengan terserap sebesar 100%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah Waktu pendistribusian dan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sekretariat Daerah yaitu selama 12 Bulan dan terlaksana selama 12 Bulan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	2021	2021	2021
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana kantor dan Rumah Tangga Pimpinan yang Baik dan Terpelihara	100%	100%	100%



serta peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			
---	--	--	--

Capaian Indikator kinerja sebesar 1005 diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%. Realisasi sebesar 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Indikator yang ditetapkan yaitu tingkat kehadiran Pegawai/ASN sebesar 100% dan terelaborasi 100%. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator yang ditetapkan yaitu Cakupan Layanan Administrasi Umum sebesar 100% dan terealisasi 100%. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan indikator yang ditetapkan yaitu Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan OPD sebanyak 30 Jenis/Item teralisasi 30 Jenis/Item. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator yang ditetapkan yaitu Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100% dan terlaksana sebesar 100%, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan Indikator kinerja yaitu Cakupan Pemeliharaan BMD sebesar 100%, terlaksana sebesar 100%. Serta semua kegiatan selesai dilaksanakan.

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Kelembagaan yang efektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	2021	2021	2021
Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran tepat fungsi	100%	96,73%	96,73%
Nilai AKIP Kabupaten	60,01	-	-
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,66	81,45	100%

Capaian indikator kinerja Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran tepat fungsi dapat diperoleh sebesar 96,73% dari realisasi 96,73% terhadap target 100%. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diperoleh sebesar 100% dari realisasi nilai 81,45% terhadap target nilai 80,66, sedangkan untuk Nilai AKIP Tahun 2021 belum didapat dari kementerian. Realisasi sebesar 96,73% dan 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :



Kegiatan Penataan Organisasi, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan indikator yang ditetapkan yaitu Persentase Survey Kepuasan Masyarakat target 100%, realisasi 100%, Jumlah tersusunnya SOP yaitu 25 SOP, sampai dengan akhir tahun telah tersusun sebanyak 44 SOP, Jumlah regulasi kebijakan ketatalaksanaan target 2 Regulasi, telah terlaksana 2 regulasi, Data pengaduan pelayanan public terpadu target 1 Dokumen dan telah terealisasi 1 dokumen, dan data inovasi daerah target 1 dokumen terealisasi 1 Dokumen, dan kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Sub kegiatan Peningkatan kinerja dan Reformasi Brokrasi terdapat beberapa target yang ditetapkan yaitu Jumlah Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Target 1 Laporan dan telah terealisasi 1 Laporan, target kedua jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 Laporan, telah terealisasi 1 laporan. Kegiatan selesai dilaksanakan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan ditetapkan sebanyak 4 indikator yaitu Jumlah OPD yang Right Sizing, Jumlah Peraturan Bupati Terkait Kelembagaan, Jumlah Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, serta Jumlah tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan, target telah tercapai yaitu 100%. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Sasaran 3. Meningkatnya Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	2021	2021	2021
Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan Lancar dan terdokumentasi	100%	100%	100%

Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%. Relasi sebesar 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari : Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasi Tugas dan Pimpinan, semua kegiatan mencapai target yaitu sebesar 100% dan kegiatan telah selesai dilaksanakan.



Sasaran 4. Meningkatnya Kemampuan Dan Kemandirian Daerah Dalam Menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	2021	2021	2021
Persentase Keterisian Data IKK LPPD	100%	100%	100%
Skor LPPD	3≤STSAST	-	-

Capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%.

Realisasi sebesar 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan indikator yang ditetapkan yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah 1 Laporan dan terserap sebesar 100%, Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal sebanyak 1 Laporan. Terealisasi 1 Laporan, Jumlah Pelaksanaan Event dalam rangka peningkatan nilai kebangsaan target 2 Event (Hari Jadi Kabupaten & HUT RI) telah selesai dilaksanakan atau terserap 100%.

Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan Indikator yang ditetapkan yaitu jumlah Laporan Pembukuan Nama Rupa Bumi target 13 Kecamatan Namun kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam memperoleh data rupabumi di Kecamatan, Kurangnya dukungan dari Desa/ Kecamatan dalam memperoleh data rupabumi. Dan indikator Jumlah tanda batas Kabupaten & Jumlah tanda Batas Kecamatan dengan target 4 Tanda Batas Kabupaten & 8 Tanda Batas Kecamatan terserap 100%. Kegiatan selesai dilaksanakan.

Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Indikator yang ditetapkan yaitu Jumlah Kecamatan yang dilakukan penilaian camat teladan sebanyak 13 Kecamatan, Jumlah Rapat Rapat Koordinasi camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 1 Dokumen, Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan PATEN sebanyak 1 Laporan dan jumlah monitoring pelaksanaan, perencanaan, penganggaran dan perbendaharaan sebanyak 2 laporan, semua terserap 100% dan kegiatan selesai dilaksanakan.

Pemberian Skor LPPD akan didapat oleh Kabupaten/Kota setelah Kemendagri melakukan evaluasi, oleh karena itu belum adanya nilai LPPD Tahun 2021 Kab. Tanjab Barat.

Sasaran 5. Meningkatnya Pengalaman Nilai-Nilai Agama Dan Nilai-Nilai Kesejahteraan Rakyat



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	2021	2021	2021
Persentase Kebijakan Bidang Urusan Kesejahteraan Rakyat Yang Dilaksanakan	100%	86,44%	86,44%

Capaian Indikator kinerja sebesar 86,44% diperoleh dari realisasi 86,44% terhadap target 100%.

Realisasi sebesar 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

Kegiatan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat beberapa indikator yang ditetapkan yaitu Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Syiar Nilai-nilai yang terserap 55,56% dengan target 9 Kali Peringatan Hari Besar yang terealisasi 5 Kali Peringatan Hari Besar. Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre MTQ terserap 100%, Jumlah Cabang Lomba MTQ tingkat Provinsi yaitu 26 Cabang Lomba terserap 100%, Jumlah Pembinaan Pengembangan Tilawatil Qur'an yang dilaksanakan terserap 100%, Jumlah Penyelesaian Proses pencatatan Pernikahan Bagi Masyarakat sebanyak 653 Pasang realisasi 556 Pasang atau 85,15%, Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Amaliyah Ramadhan dan Dua Hari Raya terserap 100% atau 5 kali, Jumlah Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi terserap 100%, Jumlah Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji serta Pengiriman TKHD tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya pelaksanaan Haji.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kehijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dengan Indikator yang ditetapkan yaitu Jumlah Da'I Desa yang diberi Pembinaan target 134 Orang realisasi 110 Orang atau 82,09%, Jumlah Guru Minggu yang diberikan Insentif Pembinaan target 200 orang realisasi 100 orang atau 50,00%, Jumlah Guru Agaa, Imam, Mudim dan Guru Ngaji, Muallaf yang diberi Pembinaan target 3.545 Orang terealisasi 5.349 Orang atau 150,89%, Jumlah Evaluasi Berkas Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial target 2 Berkas terealisasi 2 Berkas atau 100%.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator yang ditetapkan yaitu Jumlah rapat Koordinasi dan Sinkronisasi serta Pertemuan Forum Tim Pembina UKS Tingkat Kabupaten target 2 kali terserap 100% atau terealisasi 2 kali.

Sasaran 6. Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	2021	2021	2021
Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%	146%	146%

Capaian indikator kinerja sebesar 146% diperoleh dari realisasi 146% terhadap target 100%. Realisasi sebesar 146% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator yang ditetapkan Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah target 12 PERda, 50 Perda dan 1000 SK terealisasi 15 Perda, 34 Perbup, dan 846 SK,

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan indikator Jumlah Perkara, Laporan dan Lomba Kadarkum target 3 Kasus, 4 Kali Laporan Aksi HAM dan 1 Laporan Kadarkum realisasi 3 Kasus, 8 kali Laporan Aksi HAM, 1 Laporan Kadarkum.

Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan Indikator Jumlah Produk Hukum Disebarluaskan dan Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan target 600 Buku Raperda dan Himpunan Perda, 12 Desa/Kel, 4 Kali Jumlah Koordinasi Penetapan Raperda dan 1 Laporan SJDIIH realisasi target 700 Buku Raperda dan Himpunan Perda, 12 Desa/Kel, 15 Kali Jumlah Koordinasi Penetapan Raperda dan 2 Laporan SJDIIH.

Sasaran 7. Meningkatnya Kerjasama antar Daerah/Lembaga/Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	2021	2021	2021
Persentase Kerjasama Antar Daerah, Lembaga/Perorangan yang terfasilitasi	100%	100%	100%



Capaian indicator kinerja sebesar 146% diperoleh dari realisasi 146% terhadap target 100%.

Realisasi sebesar 146% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri indikator 67 Dokumen terserap 100%. Dan selesai dilaksanakan.

Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri target Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri 3 Dokumen realisasi 3 Dokumen atau terserap 100% dan kegiatan selesai dilaksanakan.

Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama target Jumlah Dokumen Monitoring & Evaluasi Kerjasama Daerah, Lembaga/Perseorangan Dalam & Luar Negeri sebanyak 70 Dokumen terealisasi 70 Dokumen atau terserap 100%. Dan kegiatan selesai dilaksanakan.

Sasaran 8. Meningkatnya Administrasi Perumusan dan Evaluasi Kebijakan

Perekonomian Daerah.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	2021	2021	2021
Persentase Kebijakan Bidang ekonomi yang dilaksanakan	100%	94,44%	94,44%

Capaian indicator kinerja sebesar 93,33% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%.

Realisasi sebesar 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

Sub Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD indikator yang ditetapkan Jumlah BUMD yang diberikan penyertaan modal (PT. BPR Tango Rajo, PT. Tanjab Sakti, Bank Jambi) target 3 BUMD realisasi 1 BUMD atau sebesar 33,33%. Hal ini karena Terbatasnya kemampuan APBD Kab. Tanjab Barat Tahun Anggaran 2021 dan belum terpenuhinya struktur organisasi dan rencana bisnis anggaran PT. Jabung Barat sakti. Indikator Jumlah BUMD yang diberikan subsidi (PDAM Tirta Pengabuan) sebanyak 1 BUMD terserap 100%, Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD sebanyak 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau terserap 100%, dan indikator jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD sebanyak 4 kali atau terserap 100%.

Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan Indikator ditetapkan yaitu Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Daerah target 4



kali terserap 100%, Jumlah Laporan Sembako sebanyak 12 Laporan terealisasi 12 Laporan atau terserap 100%, dan Jumlah Laporan TPID sebanyak 5 Laporan dan terserap 100%.

Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil target yang ditetapkan yaitu Jumlah Laporan KUPEM sebanyak 12 Laporan terealisasi 12 Laporan terserap 100%, Jumlah Laporan Pupuk sebanyak 4 Laporan terserap 100%, Jumlah Monitoring dan Pembinaan KUPEM sebanyak 4 kali terserap 100%, dan Jumlah Monitoring dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida Tepat Sasaran sebanyak 4 Kali terserap 100%. Dan Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Sasaran 9. Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	2021	2021	2021
Persentase Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah	100%	93,33%	93,33%
Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu	100%	62,12%	62,12%

Capaian indicator kinerja sebesar 93,33% diperoleh dari realisasi 93,33% terhadap target 100%. Realisasi sebesar 93,33% dan sebesar 62,12 % diperoleh dari realisasi 93,33% dan 62,12% terhadap target 100%. didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dengan Indikator JUmlah Buku Data Pembangunan 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen atau terserap 100%, Frekuensi rapat-rapat Koordinasi dalam rangka penyusunan program diKab. Tanjab Barat target 12 Bulan dan terserap 100%.

Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Target Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan dan Pelaporan Hasil Monitoring target 4 Kali dan terserap 100%.

Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan Target Jumlah LPPK dan Rekap Program OPD sebanyak 12 Laporan dan terealisasi 12 Laporan, dan Jumlah Pelaporan Tepra melalui SISmon Tepra target 12 Laporan terealisasi 11 Laporan atau 91,67%. Dan kegiatan selesai dilaksanakan.



Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator yang ditetapkan yaitu Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang ditender sebanyak 255 Kegiatan Tender realisasi kegiatan yaitu sebanyak 248 tender atau terserap 97,25%.

Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan indikator Jumlah Pemeliharaan Co. location target 1 Paket Co Location terserap 100% dan Jumlah Server yang dilakukan Pengecekan dan Servis Berkala target 1 Server Produksi dan 1 Server Backup terserap 100%. Dan kegiatan selesai dilaksanakan.

Sub Kegiatan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Indikator JUmlah peserta sosialisasi dan Jumlah peserta ujian Sertifikasi PBJ tingkat dasa, kegiatan Ini tidak terlaksana dikarenakan seluruh kegiatan belanja Bimtek, Kursus Singkat dan Sosialisasi merupakan Tusi dari BKPSDM, maka seluruh kegiatan yang terdapat pada Sub Bagian ini diambil alih pelaksanaannya oleh BKPSDM.

Sasaran 10. Meningkatnya Koordinasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam yang Kondusif.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	2021	2021	2021
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Urusan Sumber Daya Alam yang Terlaksana dengan Efektif	100%	100%	100%

Capaian indicator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%.

Realisasi sebesar 100 % didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan Indikator Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, Kehutanan dan Kelautan dan Perikanan sebanyak 13 kali dan terserap 100%, dan Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi sebanyak 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau terserap 100%.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan Target Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi,



Fasilitasi dan Monitoring Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang terlaksana dengan efektif target 5 Kali terserap 100%, dan Jumlah Laporan Evaluasi sebanyak 1 Laporan atau terserap 100%. Dan kegiatan selesai dilaksanakan.

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pada tahun Anggaran 2021, Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat menganggarkan sebesar Rp. 71.341.003.774,00 . Dengan jumlah program sebanyak 3 program, jumlah kegiatan sebanyak 19 Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Per-Program Setda Tanjab Barat Tahun 2021

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persen
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	51,952,715,673.00	39,672,779,068.00	76.36%
1.	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88,795,000.00	79,575,500.00	89.62%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88,795,000.00	79,575,500.00	89.62%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20,665,096,761.00	15,813,832,546.00	76.52%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19,573,191,761.00	14,784,062,546.00	75.53%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	976,905,000.00	924,320,000.00	94.62%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian. Verifikasi Keuangan SKPD	63,325,000.00	57,325,000.00	90.53%
	Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	51,675,000.00	48,125,000.00	93.13%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	87,425,000.00	46,875,000.00	53.62%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	87,425,000.00	46,875,000.00	53.62%



	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	655,918,800.00	469,501,805.00	71.58%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	353,518,800.00	327,734,000.00	92.71%
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	252,400,000.00	141,767,805.00	56.17%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000.00	-	0.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,161,391,944.00	8,920,038,701.00	73.35%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	259,856,864.00	239,638,850.00	92.22%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	438,890,338.00	426,005,000.00	97.06%
	Penyediaan peralatan rumah Tangga	1,714,127,267.00	1,664,484,177.00	97.10%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,792,240,220.00	1,937,718,078.00	69.40%
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66,009,255.00	63,624,000.00	96.39%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	6,890,268,000.00	4,588,568,596.00	66.59%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,666,978,594.00	4,297,762,997.00	92.09%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,666,978,594.00	4,297,762,997.00	92.09%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,596,005,523.00	2,788,596,669.00	60.67%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	463,425,000.00	388,581,000.00	83.85%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,840,500,000.00	1,184,235,241.00	64.34%
7.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,654,615,000.00	581,240,000.00	35.13%



	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	637,465,523.00	634,540,428.00	99.54%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,304,950,000.00	4,093,726,520.00	77.17%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2,682,669,000.00	1,858,686,679.00	69.28%
8.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	747,511,800.00	486,225,500.00	65.05%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	1,874,769,200.00	1,748,814,341.00	93.28%
10.	Adminitrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,062,207,900.00	590,286,174.00	55.57%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	1,062,207,900.00	590,286,174.00	55.57%
	Penataan Organisasi	403,997,473.00	317,109,256.00	78.49%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analiss Jabatan	112,871,156.00	89,864,000.00	79.62%
11.	Fasilitasi pelayanan Publik dan Tata laksana	124,995,606.00	92,898,706.00	74.32%
	Peningkatan kinerja reformasi birokrasi	166,130,711.00	134,346,550.00	80.87%
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,259,948,678.00	2,255,473,900.00	99.80%
	Fasilitasi keprotokolan	188,519,800.00	185,519,800.00	98.41%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	465,923,000.00	465,154,500.00	99.84%
12.	Pendokumentasian tugas pimpinan	1,605,505,878.00	1,604,799,600.00	99.96%
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10,579,238,415.00	9,119,415,472.00	86.20%
	Administrasi Tata Pemerintah	662,687,795.00	492,754,235.00	74.36%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	369,479,680.00	302,578,200.00	81.89%
13.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	129,711,400.00	94,901,400.00	73.16%



	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	163,496,715.00	95,274,635.00	58.27%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8,339,359,383.00	7,186,648,268.00	86.18%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	7,590,003,635.00	6,515,806,068.00	85.85%
14.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	718,213,300.00	652,623,300.00	90.87%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	31,142,448.00	18,218,900.00	58.50%
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,006,597,269.00	990,564,269.00	98.41%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	488,814,271.00	488,814,271.00	100.00%
15.	Fasilitasi Bantuan Hukum	242,638,000.00	226,605,000.00	93.39%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	275,144,998.00	275,144,998.00	100.00%
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	570,593,968.00	449,448,700.00	78.77%
	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	317,892,065.00	259,234,300.00	81.55%
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	146,232,203.00	105,644,700.00	72.24%
16.	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	106,469,700.00	84,569,700.00	79.43%
	Program Perekonomian dan Pembangunan	8,809,049,686.00	8,482,744,398.00	96.30%
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	7,277,477,298.00	7,219,877,298.00	99.21%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	7,138,436,500.00	7,110,951,500.00	99.61%
17.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	67,357,848.00	49,367,848.00	73.29%



	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	71,682,950.00	59,557,950.00	83.09%
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	305,663,400.00	252,818,400.00	82.71%
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	124,350,000.00	107,175,000.00	86.19%
18.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36,313,400.00	15,343,400.00	42.25%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	145,000,000.00	130,300,000.00	89.86%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	587,150,288.00	427,620,000.00	72.83%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	191,450,000.00	137,400,000.00	71.77%
19.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	325,700,000.00	290,220,000.00	89.11%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	70,000,288.00	-	0.00%
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya ALam	638,758,700.00	582,428,700.00	91.18%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	85,739,600.00	66,124,600.00	77.12%
	Jumlah	71.341.003.774,00	57.274.938.938,00	80.28%

Sumber : Data Bag. RENKEU tahun 2021

Realisasi anggaran belanja yang dikelola oleh seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir tahun 2021 sebesar Rp. 57.274.938.938,00,-. Untuk realisasi keuangan sebesar 80,28%. Efisiensi anggaran dioptimalkan melalui penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Upaya perwujudan Visi dan Misi Sekretariat Daerah dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, membangun harmonisasi dan mengintegrasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan mendorong percepatan perwujudan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi Kabupaten yang Maju, Aman, Adil, dan Merata Berlandaskan Iman dan Taqwa.

Dokumen ini berupaya memaparkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2021, dengan seluruh hasil capaiannya baik yang masih berupa out put maupun out come dari program-kegiatan.

Faktor pendorong dalam capaian keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah antara lain adalah ditetapkannya regulasi-regulasi pusat tentang tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga mendorong tumbuhnya komitmen untuk membangun dan melaksanakan AKIP tatanan SAKIP secara lebih komprehensif di seluruh sisi bidang penyelenggaraan pemerintahan. Semakin selarasnya berbagai kebijakan pusat dan lintas sektoral menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang perubahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu kebutuhan bukan sekadar kewajiban. Hal tersebut telah mendorong tingkat koordinasi yang semakin tinggi dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah antara lain adalah :

1. Masih ada kebijakan dan regulasi pusat yang belum sinergis baik dalam penetapan maupun pengaturannya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam implementasinya di daerah.
2. Masih adanya kebijakan pusat yang tidak dapat di implementasikan karena terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi dan karakteristik potensi dan permasalahan pemerintahan daerah.
3. Masih belum terkoordinasinya perencanaan Bagian-Bagian pada lingkup Sekretariat Daerah secara maksimal, sehingga masih terdapat kecenderungan perencanaan yang bersifat mandiri, menyebabkan daya dorong terhadap tercapainya impact (dampak) dari program kegiatan Sekretariat Daerah belum maksimal.
4. Penetapan indikator-indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan indikator kinerja yang tepat, sehingga target kinerja tiap tahun cenderung statis dan tidak dapat menunjukkan/menggambarkan hasil kinerja sebenarnya.



5. Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan fasilitasi perumusan, perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan belum optimalnya peran, fungsi, dan kualitas kinerja Sekretariat Daerah sebagai core Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. LANGKAH KEDEPAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah:

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkenaan dengan regulasi-regulasi pusat yang terdapat perbedaan-perbedaan dalam penetapan maupun pengaturannya.
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan seluruh OPD, untuk memaksimalkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan otonomi daerah, maupun dalam akselerasi implementasi regulasi dan ketentuan pusat sesuai dengan kondisi, karakteristik, potensi dan permasalahan daerah.
3. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja sekretariat daerah melalui koordinasi internal Sekretariat Daerah, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Sekretariat Daerah sebagai contoh dan tauladan bagi OPD.
4. Meningkatkan kualitas SDM Sekretariat Daerah melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang akuntabilitas capaian kinerja Sekretariat Daerah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2021.

Kuala Tungkal, 10 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Ir. MAGUS SANUSI, M.Si
Pejabat Utama Muda
19680817 199203 1 007